

## **Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan**

**English Title: Collaborative Governance in the Development of Pinge Tourism Village, Marga District, Tabanan Regency**

**1<sup>st</sup> Ni Made Angeliana Suwantara Putri <sup>\*a</sup>**

**2<sup>nd</sup> Putu Eka Purnamaningsih <sup>a</sup>**

**3<sup>rd</sup> Ni Wayan Supriliyani <sup>a</sup>**  <https://orcid.org/0000-0002-1709-5291>

<sup>a</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Indonesia

---

### **Abstract**

*This study aims to determine how the implementation of collaborative governance in the development of Pinge Village, Marga District, Tabanan Regency. In this study, the author used a type of qualitative research with a descriptive method. The analysis uses the theory of collaborative governance success measures from Deseve in Sudarmo (2011). The research findings show that collaboration between the government, private sector and the community has been going quite well, but there are several problems such as dominance from the community, there is still collaboration without written cooperation documents, and inadequate financial and human resources. The recommendations that's possible are that the government more routinely conducts direct observations, expanding collaboration networks and the community's more enthusiastic about contributing to the development of tourism villages.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis menggunakan teori ukuran keberhasilan *collaborative governance* dari Deseve dalam Sudarmo (2011). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan seperti adanya dominasi dari pihak masyarakat, masih terdapat kolaborasi tanpa dokumen kerja sama tertulis, dan sumber daya keuangan dan SDM yang belum memadai. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah lebih rutin melakukan pengamatan langsung, swasta lebih intens melakukan promosi, pengelola meningkatkan kapasitas pelayanan wisata, memperluas jaringan kolaborasi, membuat aturan yang mengikat antar *stakeholder* dan masyarakat lebih semangat berkontribusi dalam pengembangan desa wisata.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, Pengembangan Desa Wisata, Stakeholders*

---

**Keywords:** *Collaborative Governance, Tourism Village Development, Stakeholders*

**\* Correspondence:** [angelianasuwantara@gmail.com](mailto:angelianasuwantara@gmail.com)

## **1. Pendahuluan**

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri yang strategis dan dapat menghasilkan devisa negara secara cepat. Pernyataan tersebut mencerminkan tujuan dari kepariwisataan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa tujuan kepariwisataan diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan sektor pariwisata yang terjadi secara terus-menerus akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pajak dan pendapatan nasional, serta memberikan dorongan bagi sektor-sektor lainnya secara ekonomi (Muryani, 2021). Mengingat industri pariwisata memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah, maka dari itu pemerintah berupaya meningkatkan sektor ini dengan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan pariwisata dengan segala potensi yang ada.

Perkembangan sektor pariwisata dewasa ini menunjukkan pergeseran tren perjalanan wisatawan dari model wisata massal (*mass tourism*) menuju wisata alternatif (*alternative tourism*) yang lebih menitikberatkan pada kegiatan wisata alam atau budaya lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas wawasan dan mencari pengalaman petualangan yang lebih mendalam seperti wisata perdesaan. Berlandaskan kearifan lokal kultural masyarakatnya, desa memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang menawarkan nilai keunikan budaya dan tradisi yang melekat pada masyarakat setempat. Salah satu pendekatan pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat melalui *Community Based Tourism* (CBT) dapat diwujudkan melalui pengembangan desa wisata. (Pedoman Desa Wisata Edisi II, 2021).

Keberadaan desa wisata di Indonesia berkembang semakin pesat yang ditunjukkan pada data peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 bahwa saat ini sudah terdapat 4.795 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi, dimana desa-desa wisata tersebut memiliki klasifikasi bervariasi mulai dari desa wisata rintisan hingga desa wisata mandiri (Jadesta, 2023). Kemudian, Berdasarkan data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat 238 desa wisata yang tersebar di seluruh wilayah Bali, diantaranya 17 desa wisata di Kabupaten Badung, 31 desa wisata di Kabupaten Bangli, 26 desa wisata di Kabupaten Karangasem, 75 desa wisata di Kabupaten Buleleng, 6 desa wisata di Kota Denpasar, 25 desa wisata di Kabupaten Tabanan, 19 desa wisata di Kabupaten Klungkung, 7 desa wisata di Kabupaten Jembrana, dan sebanyak 31 desa wisata di Kabupaten Gianyar. Berkembangnya sejumlah desa wisata dengan mengusung tema wisata alam, budaya lokal dan kerajinan diharapkan mampu meningkatkan mutu dari pariwisata yang ada di Bali tidak terkecuali pariwisata di Kabupaten Tabanan.

Tabel 1. Kunjungan Desa Wisata Pingetahun 2014-2022

No	Tahun	Pulang Pergi	Menginap	Jumlah Wisatawan
1	2014	752	115	867
2	2015	502	354	856
3	2016	976	698	1.674
4	2017	701	853	1.560
5	2018	1.100	775	1.875
6	2019	1.705	1.258	2.968
7	2020	754	-	754
8	2021	775	-	775
9	2022	1.139	557	1.696

Sumber: Pengelola Desa Wisata Pingetahun 2023

Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* didefinisikan sebagai serangkaian pengaturan dimana suatu lembaga publik secara aktif melibatkan pemangku kepentingan yang berasal dari sektor non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan yang memiliki sifat formal, dipertimbangkan secara seksama melalui musyawarah dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Partisipasi pihak non-pemerintah dalam tata kelola pemerintahan berkontribusi secara signifikan dari segi keuangan ataupun inovasi dalam pengelolaan pemerintahan, terutama melalui kerja sama yang kuat. Keterlibatan berbagai pihak dalam tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting karena dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dan membangun rasa tanggung jawab bersama dalam pengelolaan desa wisata (Molla, 2021).

Desa Wisata Pinget dikelola oleh masyarakat, khususnya Kelompok Sadar Wisata Pinget Asri dan Pengelola Desa Wisata Pinget di bawah Desa Adat Pinget. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Langkah-langkah dukungan melibatkan penilaian kelayakan, penetapan desa wisata, dan kerja sama dengan BUMN pada 2016. Pemerintah daerah juga memberikan pelatihan SDM, melakukan monitoring, serta mempromosikan melalui website Dinas Pariwisata. Kolaborasi dengan swasta, seperti PT. Warisan Keluarga Kita, membantu pemasaran daring. Kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, juga terjadi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

Namun, perjalanan dua puluh tahun Desa Wisata Pinget tidak terlepas dari permasalahan. Infrastruktur yang kurang baik dan kekurangan prasarana di Laduma menjadi kendala. Pendanaan dari hasil pengelolaan desa wisata sendiri, tanpa dukungan anggaran pemerintah, menjadi tantangan. Masalah SDM termasuk kurangnya penguasaan teknologi, kemampuan bahasa asing, dan kurangnya partisipasi pemuda. Selain itu, peran stakeholders dalam promosi belum optimal, dengan pemerintah kurang fokus, kegiatan promosi yang kurang atraktif, dan keterbatasan kapasitas pengelola desa wisata dalam mengelola media sosial dan website secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pinget, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Teori	Inti sari
1	Aninda Diah Maharani Utami, Dyah Hariani, dan Susi Sulandari (2020)  <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang	Model <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis <i>collaborative governance</i> dan faktor keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul masih belum optimal. Ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman bersama, kejelasan aturan, dan kurangnya komitmen dari para <i>stakeholders</i> . Selanjutnya, terdapat beberapa faktor keberhasilan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Kemetul, di antaranya adalah adanya saling percaya di antara partisipan, akses terhadap kekuasaan, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Sedangkan faktor struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, dan kejelasan dalam tata kelola belum dapat diimplementasikan dengan baik.
2	Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni (2018)  <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul	Indikator <i>collaborative governance</i> menurut Deseve	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik <i>collaborative governance</i> yang dilakukan oleh para <i>stakeholders</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor belum adanya aturan resmi yang mengikat kolaborasi antara para <i>stakeholders</i> , faktor keterbatasan SDM, anggaran, dan fasilitas desa wisata, serta faktor minimnya kepercayaan antara para <i>stakeholders</i> . Terdapat faktor penghambat lainnya yang berasal dari faktor budaya, institusi, dan politik yang mempengaruhi kolaborasi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan desa wisata.
3	Dwi Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, dan Ansyari Mone (2019)  <i>Collaborative Governance</i> Dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	<i>Collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan wisata edukasi di Desa Kamiri berjalan dengan baik. Adapun tahapan-tahapan proses kolaborasi yang telah dilakukan: (1) Dialog Tatap Muka, ditandai dengan mengadakan forum musyawarah bersama <i>stakeholders</i> terkait, (2) Membangun Kepercayaan, ditunjukkan dengan penyediaan tempat sampah di lokasi wisata dan pelatihan pengembangan SDM, (3) Komitmen dalam Proses Kolaborasi, ditandai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui promosi dan sosialisasi, dan (4) Menilai Sejauh Mana Proses Kolaborasi, ditandai dengan adanya forum pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta

			penyediaan pamong wisata untuk mengontrol keamanan wisata.
4	Fadlurrahman, Ari Mukti, Yuni Kurniasih, dan Rizza Arge Winanta (2022)  <i>Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur</i>	<i>Collaborative governance</i> (dalam Sudarmo, 2011)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi dalam pemerintahan beserta tantangan yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo masih belum optimal. Terdapat struktur jaringan yang tidak memiliki kesatuan visi dan tujuan untuk membentuk desa wisata. Hal tersebut juga berdampak pada ketidakefektifan dimensi kolaborasi pemerintahan lainnya, yang menjadi penghambat dalam percepatan pembentukan desa wisata di Ngargogondo.
5	R. Slamet Santoso & Titik Djumiarti (2020)  <i>Collaborative Governance in Tourism Development at the Protected Area Sangiran Indonesia</i>	Dimensi <i>collaborative governance</i> menurut Stephan Balogh	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata dan untuk menemukan model <i>collaborative governance</i> yang efektif untuk diterapkan untuk pengembangan pariwisata di Kawasan Lindung Sangiran, Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam dimensi Konteks Sistem menciptakan peluang adanya kolaborasi antara <i>stakeholders</i> untuk mempercepat pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Sangiran. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi seperti kurangnya peran sektor swasta dalam kolaborasi, pembagian tugas dan peran dari masing-masing pihak dalam pengembangan kawasan wisata Sangiran masih belum jelas, dan tuntutan pembangunan daerah mengharuskan keterlibatan pemerintah daerah yang menyebabkan proses kolaborasi cenderung tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan rangkuman penelitian sebelumnya, seperti yang ditampilkan dalam tabel 2 di atas, terdapat perbedaan serta yang persamaan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian, yaitu mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata.

## Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu upaya, proses, atau strategi yang digunakan untuk mencapai integrasi dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata. Hal ini melibatkan integrasi aspek-aspek diluar sektor pariwisata yang baik langsung atau secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan pariwisata. Strategi pengembangan pariwisata ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengembangan sektor pariwisata, meningkatkan daya tarik destinasi, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pemerintah (Mebri, 2022). Adapun faktor pokok pengembangan destinasi pariwisata menurut Cooper dalam Sunaryo (2013) adalah; *Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Service*, dan *Institutions*.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Cooper, Carter serta Fabricus pada Sunaryo (2013) memaparkan ada beberapa komponen dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang meliputi; pengembangan atraksi serta daya tarik wisata, pengembangan amenitas serta akomodasi wisata, pengembangan aksesibilitas, dan pengembangan *image*.

## Desa Wisata

Menurut Nuryanti dalam Sutadji (2020), desa wisata merupakan sebuah bentuk pengembangan pariwisata yang difokuskan pada pelestarian lingkungan di perdesaan serta melibatkan kontribusi aktif masyarakat sekitar desa.

Desa wisata menawarkan produk wisata yang memiliki nilai budaya yang tinggi dan identitas tradisional yang kuat. Konsep desa wisata melibatkan integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang disajikan dalam kerangka kehidupan masyarakat yang melekat pada adat istiadat dan tradisi yang ada. Pedoman Desa Wisata Tahun 2020 menjelaskan bahwa desa wisata, yang dapat disebut juga dengan sebutan kampung, nagari, *gampong*, atau istilah lainnya, merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas. Di dalam desa wisata, wisatawan dapat merasakan pengalaman unik dalam kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan beserta segala potensinya.

### Stakeholder

Menurut Freeman dalam Astuti (2020), *stakeholder* (pemangku kepentingan) dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang atau perorangan yang saling dipengaruhi dan mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pandangan ini, para *stakeholder* yang terlibat dalam suatu kondisi dapat saling mempengaruhi dan juga dapat dipengaruhi oleh organisasi dalam kondisi tersebut, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nugroho (dalam Nugroho, et al., 2022) kemudian menjelaskan adanya klasifikasi *stakeholder* berdasarkan peran yang mereka mainkan, termasuk; *Policy creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator.

### Teori Governance

Paradigma *governance* adalah paradigma baru yang telah dianut dan menjadi populer di beberapa negara di seluruh dunia. Sejak awal munculnya, paradigma terkait penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami berbagai perubahan. Chemma dalam Keban (2014) mengidentifikasi empat periode perkembangan paradigma yang dimulai dari *tradisional Public Management*, *Public Management*, *New Public Management*, dan paradigma *Governance*.

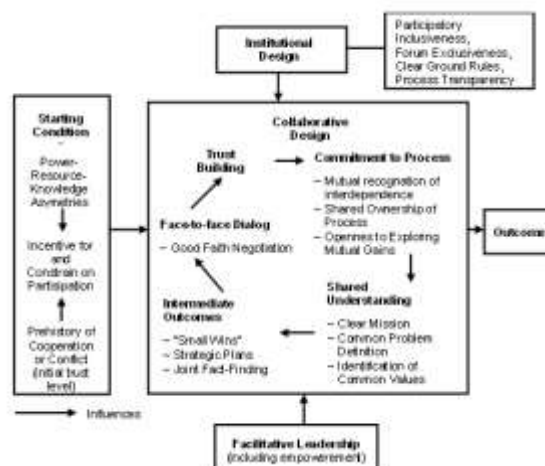
### Collaborative Governance

Salah satu bentuk turunan dari teori *governance* ialah penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif atau umumnya disebut *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Gash (2007: 545) "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*". Konsep ini menjelaskan pentingnya suatu kondisi dimana sektor publik dan sektor privat bekerja secara kolektif dengan metode yang khas untuk menetapkan hukum dan aturan dalam penyediaan barang publik. Konsep *collaborative governance* menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan sektor swasta dalam menciptakan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kolaborasi antara sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (organisasi bisnis atau perusahaan) menjadi sangat penting. Keduanya bekerja bersama untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

### Model Collaborative Governance

Terdapat beberapa model dalam *collaborative governance* yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis kolaborasi antara para *stakeholder*. Ansell dan gash (2007) dalam hal ini mengklasifikasi model tahapan dalam terwujudnya *collaborative governance* seperti yang telah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Collaborative Governance



Sumber: Model of collaborative governance Ansell and Gash, 2007

### 3. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiono (2013), metode penelitian pada dasarnya ialah metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk memudahkan proses pengumpulan data. Ketepatan pemilihan metode penelitian sangat penting karena metode yang dipilih akan membimbing peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karenanya, metodologi penelitian menjadi ujung tombak pedoman untuk memperoleh data yang valid dalam sebuah penelitian (Fiantika, 2022)

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis kondisi atau status fenomena melalui interpretasi makna kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, dari individu yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai suatu peristiwa khusus dalam konteks kehidupan masyarakat. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif ini penulis ingin menggambarkan bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pingge, Kecamatan Baru, Kabupaten Tabanan.

Menurut Rahmadi (2011), sumber data dapat didefinisikan sebagai subjek yang dapat berupa objek material atau individu yang peneliti amati, baca, atau tanyakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

Data primer dalam suatu penelitian merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam konteks penelitian pengembangan Desa Wisata Pingge, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan desa tersebut. Selain itu, pengamatan langsung atau observasi dilakukan di Desa Wisata Pingge untuk mendapatkan data yang relevan..

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti, melibatkan dokumen-dokumen, catatan, literatur, tulisan ilmiah, serta arsip resmi yang dapat mendukung dan melengkapi data primer dalam penelitian ini.

Pernyataan Sugiono (2013) menekankan pentingnya teknik pengumpulan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dianggap sebagai langkah strategis sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan yang baik tentang teknik-teknik ini, peneliti mungkin kesulitan memperoleh data sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan teknik pengumpulan data yang tepat dianggap sebagai elemen kunci yang sangat penting dalam sebuah penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dirangkum dan dipilah melalui teknik analisis data agar mendapatkan interpretasi yang tepat dan hasil penelitian yang bermakna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan dalam Sugiono (2013).

### 4. Hasil dan Pembahasan

Desa Wisata Pingge merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Secara administratif Desa Wisata Pingge berlokasi di Banjar Dinas Pingge, Desa Baru, Kecamatan Marga dan memiliki luas wilayah sekitar 140 hektar. Termasuk wilayah dataran tinggi, Desa Wisata Pingge terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan berhawa sejuk khas perdesaan dengan suhu rata-rata 19<sup>0</sup>-32<sup>0</sup>C. Adapun batas wilayah Desa Wisata Pingge yaitu Desa Apuan di sebelah utara, Sungai Yeh Kajang di sebelah timur, Desa Tua di sebelah selatan, dan Sungai Pangkung Bangka di sebelah barat. Jarak tempuh untuk menuju desa wisata ini dari Denpasar ± 38 Km, sedangkan ditempuh dengan jarak ± 20 Km dari pusat kota Tabanan. Jumlah penduduk di Desa Wisata Pingge pada tahun 2023 sebanyak 648 jiwa dengan 193 KK. Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya merupakan petani yang didukung dengan sarana lahan sawah yang luas.

**Gambar 2. Peta Desa Wisata Pinge**



Berdasarkan kisah sejarah setempat asal muasal dari nama “Pinge” ini bermula ketika daerah tersebut masih dikuasai oleh Raja Marga. Raja tersebut terus-menerus mencium bau harum, kemudian setelah ditelusuri aroma tersebut berasal dari Taru Pinge atau pohon cempaka putih yang terletak di kawasan pura peninggalan sejarah Bali kuno di desa ini yang bernama Pura Natar Jemeng. Nama “Pinge” sendiri diyakini oleh masyarakat memiliki arti “putih” yang sesuai dengan visual warna bunga dari Taru Pinge. Saat ditemukan oleh utusan Raja Marga, situasi lingkungan di sekitar Taru Pinge telah terdapat banyak rumah penduduk, namun posisi rumah-rumah tersebut dalam kondisi tidak teratur. Kemudian, oleh Raja Marga kehidupan di sekitar Taru Pinge dilakukan penataan posisi perumahan menjadi sebuah pemukiman yang diberi nama Desa Pinge, dan seiring berjalannya waktu desa tersebut bernama Desa Adat Pinge yang saat ini dikenal dengan Desa Wisata Pinge.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan melalui observasi lapangan dan wawancara yang penulis lakukan, Adapun hasil *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pinge adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Collaborative Governance**

No.	Indikator	Keterangan
1	<i>Network Structure</i>	Belum terlaksana secara maksimal sebab kolaborasi masih didominasi oleh salah satu pihak, yaitu masyarakat.
2	<i>Commitment to a Common Purpose</i>	Komitmen yang dimiliki oleh <i>stakeholder</i> yang terlibat sudah cukup baik, dimana komitmen yang dimaksud adalah hasil dari kerja sama yang dijalankan dapat dimanfaatkan secara bersama.
3	<i>Trust Among the Participant</i>	Adanya kepercayaan antar <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi pengembangan desa wisata di Desa Wisata Pinge sudah berjalan dengan baik.
4	<i>Governance</i>	Aturan mengenai batasan tindakan atau perilaku <i>stakeholder</i> didalamnya yang mengatur mengenai batasan belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kolaborasi yang tidak didukung oleh dokumen kerja sama tertulis yang secara spesifik membahas mengenai batasan-batasan tindakan dan perilaku antar <i>stakeholder</i> .
5	<i>Access to Authority</i>	Ketersediaan ukuran atau ketentuan prosedur yang jelas serta dapat diterima secara luas, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh seluruh <i>stakeholders</i> untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya sudah berjalan dengan baik
6	<i>Distributive Accountability/Responsibility</i>	Penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama dengan <i>stakeholder</i> lainnya sudah berjalan dengan baik, karena semua sektor sudah dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Pinge terutama dalam hal melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan baik.
7	<i>Information Sharing</i>	Kolaborasi yang melibatkan Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Baru, PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos, serta masyarakat yang terdiri dari Pengelola Desa Wisata Pinge, Pokdarwis Pinge Asri, Adat Desa Pinge, maupun masyarakat di Desa Wisata Pinge, keseluruhan pihak tersebut selalu memberikan dan mendapatkan

8	<i>Access to Resources</i>	informasi mengenai rencana kegiatan, siapa saja yang terlibat, hingga kegiatan yang telah dijalankan sebagai bentuk transparansi antar seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Ketersediaan berbagai jenis sumber daya, termasuk sumber daya manusia, teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi belum berjalan dengan baik. Meskipun semua pihak telah memberikan berbagai sumber daya, namun ketersediaan sumber daya khususnya pendanaan dan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan desa wisata masih belum memadai.
---	----------------------------	---

Berdasarkan tabel di atas, dari delapan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan *collaborative governance* terdapat tiga indikator yang belum memenuhi atau masih perlu dioptimalkan dalam jalannya kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge, yaitu indikator *Networked Structure*, *Governance*, serta *Access to Authority*.

## Pembahasan

### *Network Structure*

*Networked structure* yaitu suatu keadaan dimana terdapat keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya yang kemudian secara bersama mencerminkan unsur-unsur dari jaringan yang sedang dikelola. Dalam konteks *collaborative governance*, suatu unsur jaringan seharusnya tidak menciptakan hierarki dimana kontrol tertinggi dimiliki oleh satu atau sebagian pihak. Oleh karena itu, jaringan harus memiliki sifat organis diantara struktur yang terlibat, tanpa adanya hierarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Dalam pengembangan Desa Wisata Pinge terdapat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya mulai dari Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, pihak swasta yaitu PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos, dan pihak masyarakat yakni Bendesa Adat Pinge, Kelompok Sadar Wisata Pinge Asri, serta Pengelola Desa Wisata Pinge.

Tabel 4. Peran *Stakeholder* dalam Kolaborasi Pengembangan Desa Wisata

No	<i>Stakeholder</i>	Peran
1	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta memberikan pembinaan teknis kepada pelaku pariwisata termasuk Desa Wisata Pinge.
2	PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos	Melakukan promosi dan <i>marketing</i> atau pemasaran terhadap kegiatan wisata di Desa Wisata Pinge.
3	Bendesa Adat Pinge	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan desa wisata dan memberikan izin kerja sama di Desa Wisata Pinge.
4	Pengelola Desa Wisata Pinge	Mengelola seluruh kegiatan wisata yang berkaitan dengan adat dan budaya di Desa Wisata Pinge.
5	Pokdarwis Pinge Asri	Memberikan arahan dan mengawasi pelaksanaan konsep sadar wisata Sapta Pesona di Desa Wisata Pinge.

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kolaborasi di Desa Wisata Pinge didominasi oleh pihak masyarakat khususnya Lembaga Adat Desa Pinge selaku penanggung jawab pengembangan Desa Wisata Pinge. Peran dari pihak masyarakat disini sangat dominan apabila dibandingkan dengan pihak lainnya. Walaupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan juga melakukan pengawasan dan pembinaan, namun posisinya kurang menonjol karena pengembangan desa wisata ini berada di bawah kewenangan Lembaga Adat Desa Pinge sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di Desa Wisata Pinge mengacu pada aturan adat. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan definisi dari indikator *network structure*, yaitu struktur jaringan terlibat harus seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak dalam hal ini pihak masyarakat. Berdasarkan analisis temuan di atas, indikator *network structure* pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pinge belum terlaksana secara optimal, sebab masih adanya dominasi dari salah satu pihak.

### *Commitment to a Common Purpose*

*Commitment to a common purpose* menjadi pertimbangan utama keberadaan suatu *network* atau jaringan kerja sama harus ada. Hal ini dikarenakan komitmen dan perhatian bersama untuk mencapai tujuan yang positif. Tujuan tersebut umumnya terkait dengan misi keseluruhan dari suatu organisasi pemerintah. Pentingnya komitmen ini juga ditunjukkan oleh prinsip bahwa hubungan yang terjalin tidak boleh memihak pada salah satu



*stakeholder* atau pemangku kepentingan kebijakan. Hal tersebut perlu dihindari karena dapat disalahartikan sebagai kolaborasi yang hanya menguntungkan satu pihak. Dalam konteks ini, komitmen yang dijalin dalam pemerintahan kolaboratif seharusnya difokuskan pada kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Walaupun memiliki posisi dan peran yang berbeda dalam kolaborasi, pihak yang terlibat seperti pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, pihak masyarakat baik Pengelola Desa Wisata Pinge maupun Pokdarwis Pinge Asri, dan pihak swasta yaitu PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos, namun secara garis besar para pihak yang terlibat memiliki tujuan yang sama dimana mereka ingin mengembangkan Desa Wisata Pinge dilaksanakan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana dan konsep-konsep lain yang ada baik tanpa mengubah ciri khas desa wisata tersebut dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dalam mencapai tujuan tersebut, kunci utamanya adalah komitmen yang kuat antara *stakeholder* yang terlibat. Pemerintah menunjukkan komitmen melalui kegiatan monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan, dengan tujuan agar manfaat dari keberadaan Desa Wisata Pinge dapat dirasakan oleh masyarakat di Desa Wisata Pinge dan masyarakat di Desa Baru secara umum. Di sisi lain, pihak swasta menunjukkan komitmen untuk hasil yang diharapkan, dengan harapan bahwa hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan temuan tersebut, komitmen yang dimiliki oleh *stakeholder* terlibat sudah berjalan dengan cukup baik. Komitmen ini termanifestasi dalam hasil kerja sama yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Dengan demikian, terlihat bahwa hal tersebut sesuai dengan indikator *commitment to a common purpose* dimana semua pihak yang terlibat memiliki komitmen untuk mencapai tujuan kolaborasi. Adapun komitmen dalam bentuk perjanjian kerja sama yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

Tabel 5 MOU

No.	MOU	Tentang	Pihak yang terlibat
1	Perjanjian kerja sama	Penyediaan layanan reservasi properti secara <i>online</i>	Pengelola Desa Wisata Pinge dengan PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat telah memperoleh izin dan pedoman untuk mengelola, memanfaatkan, dan memperkuat suatu kawasan yang juga dijadikan destinasi desa wisata. Dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja sama mengenai penyediaan layanan reservasi properti secara *online* antara Pengelola Desa Wisata Pinge dan PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos. Hal ini menunjukkan adanya kerangka kerja formal yang mengatur interaksi antarpihak terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Pinge.

### ***Trust Among the Participant***

*Trust Among the Participants* mencerminkan hubungan profesional di mana partisipan dalam suatu jaringan memiliki kepercayaan terhadap informasi dan upaya yang disediakan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penting bagi setiap *stakeholder* untuk saling mempercayai. Kepercayaan ini menjadi wujud dari hubungan profesional yang terjalin, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Pinge memerlukan kepercayaan yang kuat di antara semua pihak yang terlibat untuk mendukung kesuksesan kolaborasi tersebut. Dalam membangun rasa kepercayaan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai *stakeholder*, termasuk pihak masyarakat seperti Pengelola Desa Wisata Pinge yang lebih mengedepankan sinergi secara kekeluargaan, serta Pokdarwis Pinge Asri yang menekankan pada komunikasi yang intensif. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap komitmen dan sinkronisasi terkait perkembangan Desa Wisata Pinge diantara pihak yang terlibat.

Kemudian dari pihak swasta, yaitu PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos berupaya untuk membangun inovasi pada sistem reservasi tamu secara daring agar seluruh data tercatat dan terjadwal dalam kalender yang dapat diakses baik dari pihak swasta maupun masyarakat sehingga nantinya kedua pihak tersebut memiliki data reservasi yang *up to date* dan bisa diakses secara *real time*. Untuk merealisasikan hal tersebut, PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos menjalin komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat khususnya Pengelola Desa Wisata Pinge. Dari pihak pemerintah juga memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata, kepercayaan ini timbul karena adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pelaku yang mengelola Desa Wisata Pinge secara langsung. Berdasarkan hasil temuan tersebut, terlihat bahwa kepercayaan telah terbangun di antara *stakeholder* yang terlibat, termasuk dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kepercayaan ini muncul karena adanya komunikasi yang baik di antara *stakeholder* dan karena kolaborasi tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator *Trust Among the Participants*, yaitu adanya kepercayaan antar *stakeholders* dalam kolaborasi, telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata di Desa Wisata Pinge.

## **Governance**

Dalam pelaksanaannya, *governance* melibatkan pembatasan terkait partisipasi pihak-pihak tertentu, aturan yang membatasi tindakan pemangku kepentingan, kebebasan untuk melakukan kerja sama, serta pengelolaan jaringan yang mencakup penyelesaian masalah penolakan atau tantangan, alokasi sumber daya, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan organisasi (Sudarmo, 2011). Pada pelaksanaan kolaborasi terkait pengembangan Desa Wisata Pinge, antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat belum sepenuhnya diatur oleh peraturan atau dokumen tertulis yang menjelaskan batasan-batasan antar pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kerja sama yang dilakukan masyarakat dengan pihak pemerintah dan beberapa *travel agent* belum terdapat PKS ataupun MOU dalam kolaborasi tersebut. Namun, pihak-pihak yang terlibat baik itu Dinas Pariwisata, pihak swasta yaitu PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos, serta masyarakat khususnya yang tergabung dalam Pengelola Desa Wisata Pinge maupun pokdarwis sudah memiliki pemahaman yang sama sehingga masing-masing pihak telah mengetahui batasan serta tugas mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator *Governance* yaitu peraturan mengenai batasan tindakan atau perilaku *stakeholder* didalamnya belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kolaborasi yang tidak didukung oleh dokumen kerja sama tertulis yang secara spesifik membahas mengenai batasan tindakan dan perilaku antar *stakeholder*. Meskipun semua pihak telah menyadari batasan-batasan mereka, akan tetapi dengan tidak adanya dokumen tertulis atau bukti fisik dalam kerja sama dapat meningkatkan risiko pelanggaran tindakan atau perilaku antar *stakeholder* di masa yang akan datang.

## **Access to Authority**

Akses terhadap wewenang merujuk pada adanya ketentuan prosedur yang jelas dan dapat diterima secara luas. Dalam konteks kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge, dapat diartikan bahwa telah ada kejelasan aturan wewenang dan diterima oleh seluruh *stakeholder*, memungkinkan mereka untuk menjalankan peran sesuai dengan kewenangan masing-masing (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Kewenangan setiap *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut dijalankan sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah disetujui. Pemerintah yang diwakili Dinas Pariwisata memiliki wewenang untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan desa wisata dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata.

Kemudian, dari pihak masyarakat baik Pengelola Desa Wisata Pinge maupun Pokdarwis Pinge Asri memiliki wewenang untuk mengelola desa wisata secara keseluruhan dengan berdasarkan pada peraturan adat seperti *awig-awig* maupun *perarem* dan tentunya tetap berkoordinasi dengan perangkat adat sebagai penanggung jawab Desa Wisata Pinge. Selain pihak pemerintah dan masyarakat, pihak swasta yakni PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos dalam hal ini juga memiliki wewenang dalam promosi akomodasi maupun kegiatan wisata yang ada di Desa Wisata Pinge. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, indikator *Access to Authority* dapat dikatakan bahwa telah ada kejelasan aturan wewenang dan dapat diterima oleh seluruh *stakeholders* sudah berjalan dengan baik, sebab masing-masing *stakeholder* sudah mengetahui dengan jelas sejauh mana mereka menjalankan peran sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata Pinge.

## **Distributive Accountability/Responsibility**

Pembagian akuntabilitas atau pertanggungjawaban merujuk pada penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama dengan *stakeholder* lainnya. Pembagian akuntabilitas atau pertanggungjawaban juga diartikan sebagai pengambilan keputusan bersama oleh seluruh anggota jaringan kerja sama yang bertujuan untuk berbagi tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dimana setiap *stakeholders* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Berkaitan dengan kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Pinge, tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak seperti pihak PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos memiliki tanggung jawab yang telah diatur dalam kontrak atau nota kesepahaman dengan masyarakat khususnya Pengelola Desa Wisata Pinge, begitu pula dengan pembagian tanggung jawab bersama pihak ketiga lainnya. Sementara itu, meskipun memiliki kedudukan yang sama dengan Pengelola Desa Wisata Pinge, Pokdarwis Pinge Asri memiliki tanggung jawab berbeda, yakni dalam hal mengawal keberlangsungan Sapta Pesona dan menyiapkan sarana bisnis yang diperlukan dalam pengembangan Desa Wisata Pinge. Kemudian pemerintah melalui Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk mengawasi Desa Wisata Pinge sejak Desa Wisata Pinge ditetapkan untuk memantau perkembangannya secara berkelanjutan.

Meskipun pengelolaan desa wisata terpusat pada Pengelola Desa Wisata Pinge dan pokdarwis, kedua lembaga tersebut tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait perkembangan Desa Wisata Pinge serta berkoordinasi dengan masyarakat perihal kebersihan lingkungan ataupun akomodasi agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan atas hasil di lapangan, indikator *Distributive Accountability/Responsibility* yaitu merujuk pada penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama dengan *stakeholder*

lainnya sudah berjalan dengan baik, karena semua sektor yang turut dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Pinge terutama dalam hal tanggung jawab yang dimiliki masing-masing *stakeholder* telah dilaksanakan dengan baik.

### **Information Sharing**

*Information sharing* mencakup kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privasi, dan pembatasan akses bagi mereka yang bukan anggota selama hal tersebut dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan kolaboratif, penting untuk adanya ketersediaan dan kejelasan pembagian informasi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan terkait. Tujuan dari kemudahan akses informasi juga adalah untuk mencegah terjadinya salah paham di antara pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Dalam konteks kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Baru, PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos, serta masyarakat yang melibatkan Pengelola Desa Wisata Pinge, Pokdarwis Pinge Asri, Adat Desa Pinge, juga masyarakat di Desa Wisata Pinge secara umum, sudah terdapat kemudahan dalam mengakses informasi. Semua pihak terlibat aktif memberikan dan mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan, partisipan yang terlibat, hingga kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal tersebut mencerminkan transparansi yang tinggi di antara semua *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, dimana transparansi ini berkontribusi pada pembangunan tingkat kepercayaan antar *stakeholder*. Baik pihak PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos dan masyarakat khususnya Pengelola Desa Wisata Pinge tetap berkoordinasi dengan baik mengenai hal apa yang mereka kerjakan, begitu juga adanya saling berbagi informasi diantara pengelola, pokdarwis beserta prajuru adat. Sementara itu, pemerintah juga selalu memperoleh informasi terkait hal-hal yang menyangkut perkembangan Desa Wisata Pinge melalui laporan maupun *website* yang dimiliki desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat dilihat bahwa kemudahan akses informasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge sudah sepenuhnya terbuka.

### **Access to Resources**

Akses terhadap sumber daya merupakan indikator yang menilai tentang kesiapan sumber daya, baik itu SDM, teknis, keuangan dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Dalam rangka kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge, semua pihak yang terlibat memberikan beragam sumber daya untuk mendukung pelaksanaan pengembangan tersebut. Adapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu pembinaan teknis dan bantuan stimulus ekonomi pasca pandemi yang berasal dari pemerintah pusat. Kemudian, dari pihak PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos yang memberikan bantuan berupa jasa promosi secara *online* untuk memperkuat *branding* dari Desa Wisata Pinge sehingga desa wisata ini nantinya lebih memiliki daya saing. Tidak hanya dari pihak pemerintah dan swasta, berbagai macam sumber daya juga diberikan oleh pihak ketiga lainnya yang memberikan dukungan dari segi infrastruktur maupun pelatihan SDM. Disamping itu, masyarakat juga turut berkontribusi berupa jasa dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata Pinge dengan bergabung pada tim pengelola desa wisata maupun pokdarwis.

Meskipun telah didukung oleh berbagai pihak, ketersediaan sumber daya dalam membantu pengembangan Desa Wisata Pinge masih belum memadai terutama dari segi keuangan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan dana yang digunakan dalam proses pengembangan desa wisata hanya mengandalkan dana operasional dan penyertaan modal adat yang jumlahnya pun terbatas. Kemudian, pengelolaan Desa Wisata Pinge juga mengalami kekurangan sumber daya manusia yang mau terlibat dalam pengelolaan desa wisata sehingga berimbas pada tidak maksimalnya kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan teknis di lapangan. Berdasarkan uraian hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator *Access to Resources* yaitu ketersediaan berbagai jenis sumber daya, termasuk SDM, teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan sumber daya khususnya pendanaan dan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan desa wisata masih belum memadai. Meskipun semua pihak telah memberikan berbagai sumber daya, akan tetapi dengan tidak memadainya sumber daya tersebut akan berpengaruh pada terhambatnya Desa Wisata Pinge untuk mencapai kemajuan dalam pengembangannya.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam penelitian berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, penulis menjelaskannya melalui konsep ukuran keberhasilan *collaborative governance* yang diuraikan oleh Deseve (2007:50) dalam Sudarmo (2011:110-116). Dari hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa:

1. *Network Structure* dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge belum dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pengembangan terpusat pada masyarakat yaitu Adat Desa Pinge yang bertanggung jawab terhadap pengembangan desa wisata, dimana seharusnya posisi dari semua *stakeholder* yang terlibat harus sejajar.
2. *Commitment to a Common Purpose* dalam kolaborasi yang dijalankan seluruh *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu mereka ingin mengembangkan Desa Wisata Pinge dengan konsep Tri Hita Karana serta memiliki komitmen yang sama, dimana hasil kerja sama yang mereka jalankan dapat dimanfaatkan secara bersama, sehingga dalam kolaborasi ini komitmen antar pihak sudah cukup baik.
3. *Trust Among the Participant* dalam kolaborasi ini telah berjalan dengan baik, dimana antar *stakeholder* yang terlibat telah memberikan kepercayaan dan dukungan secara penuh terhadap pengembangan Desa Wisata Pinge.
4. *Governance* dalam kolaborasi ini belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih adanya kolaborasi yang tidak didukung oleh dokumen kerja sama tertulis yang secara spesifik membahas mengenai batasan-batasan tindakan dan perilaku antar *stakeholder*.
5. *Access to Authority* dalam konteks kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge, telah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh seluruh *stakeholder* untuk menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga akses terhadap wewenang dalam kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik.
6. *Distributive Accountability/Responsibility* dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Pinge sudah berjalan dengan baik, karena semua sektor yang turut dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Pinge terutama dalam hal tanggung jawab masing-masing telah dilaksanakan dengan baik.
7. *Information Sharing* dalam kolaborasi ini sudah berjalan dengan cukup baik, dimana selalu dilakukan pertukaran informasi antara seluruh pihak, diantaranya Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Baru, PT. Warisan Keluarga Kita/Kecas Kecos, serta masyarakat yang terdiri dari Pengelola Desa Wisata Pinge, Pokdarwis Pinge Asri, Adat Desa Pinge, maupun masyarakat di Desa Wisata Pinge sebagai bentuk transparansi antar seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
8. *Access to Resources* dalam kolaborasi ini belum berjalan dengan baik, meskipun semua pihak telah memberikan berbagai sumber daya, namun ketersediaan sumber daya khususnya pendanaan dan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pinge masih belum memadai.

Dilihat dari ukuran keberhasilan *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari delapan indikator yang dinilai, lima indikator menunjukkan kinerja yang baik, diantaranya indikator *commitment to a common purpose*, *trust among the participant*, *access to authority*, *distributive accountability/responsibility* serta *information sharing*.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, Dwi. 2019. *Collaborative Governance* Dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 4 (2): 112-127. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>
- Ansell, Chris & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance* in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory* 18 (4): 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, Retno Sunu, dkk. 2020. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. 2023. Desa Wisata Pinge. <https://dispar.tabanankab.go.id/#>
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2023. Buku Statistik Pariwisata Bali Tahun 2022. Diakses tanggal 13 Juli 2023 pada: <https://disparda.baliprov.go.id/buku-statistik-pariwisata-bali-tahun-2022/2023/03/>
- Fadlurrahman, dkk. 2022. *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 7 (2): 29-35. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104>
- Fiantika, F. R. 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*. Dalam Novita (Ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Indonesia Tourism Development Corporation. 2021. ITDC Salurkan Bantuan Sarana Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Desa Wisata Pinge. Diakses tanggal 23 Juli 2023 pada: <https://itdc.co.id/index.php/press-release/itdc-salurkan-bantuan-sarana-penerapan-protokol-kesehatan-bagi-desa-wisata-pinge-20210530060830>

- Jadesta. 2023. Peta Sebaran Desa Wisata. Diakses tanggal 13 Juli 2023 pada: <https://jadesta.kememparekraf.go.id/peta>
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Desa Wisata*. Edisi II. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jakarta
- Maharani Utami, A. D., dkk. 2021. *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Public and Management Review* 10 (3): 281-298. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31412>
- Mebri, F. H., Ermaya Suradinata, dan Kusworo. 2022. Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12 (1): 102-114. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>
- Molla, Y., Tjahya Supriatna, dan Layla Kurniawati. 2021. *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 6 (2): 140-148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Muryani. 2021. Sektor Pariwisata sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi. Diakses tanggal 21 Desember 2022 pada Unair News: <https://news.unair.ac.id/2021/05/18/sektor-pariwisata-sebagai-mesin-baru-pertumbuhan-ekonomi/?lang=id>
- Nugroho, A. Y., Amni Z. R, Kismartini. 2022. Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Riview* 11 (2): 315-335. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33577>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Risanti, F. & Fransisca Winarni. 2018. *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research* 3 (3): 291-302.
- Santoso, R. S. & Titik Djumiarti. 2020. *Collaborative Governance* in Tourism Development at the Protected Area Sangiran Indonesia. *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)*. Atlantis Press: 351-355 <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.053>
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutadji, Eddy, Dkk. (2020). *Dinamika Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat Era 4.0*. Malang: Media Nusa Creative.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.